

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

7.1. PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN PADA SETIAP SKPD

Pengembangan kapasitas aparatur pada dasarnya adalah sebuah proses perubahan atau transformasi yang bertujuan untuk mendorong aparatur dalam mengemban tanggungjawab, memperoleh keterampilan, merubah perilaku dan mendapat nilai-nilai baru serta membuat kebijakan-kebijakan yang responsif. Proses transformasi tersebut harus diikuti dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang kinerja, penambahan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki para pelayanan masyarakat.

Secara umum daya saing sumber daya manusia (SDM) aparatur Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong baik dari segi kapasitas (terlatih, terampil) maupun kapabilitas (*capable*) di dalam melayani masyarakat diharapkan dari tahun ke tahun semakin baik. Ketersediaan SDM yang berdaya saing, disiplin dan memiliki kapasitas memadai, mampu, menguasai bidang tugasnya dan penerapannya, serta mampu mengembangkan inovasi-inovasi merupakan suatu prasyarat bagi terwujudnya misi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Semangat otonomi daerah melalui UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah semakin membuka angin segar kepada pemerintah daerah untuk dapat lebih mendekatkan pemerintah kepada masyarakat sehingga patologi birokrasi dapat sejauh mungkin dihindarkan. Di sisi lain ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kerja mutlak diperlukan di dalam mengoptimalkan pengelolaan administrasi perkantoran dan kinerja internal aparatur sehingga pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam 5 (lima) tahun ke depan tetap akan memprioritaskan pada pelayanan yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM).

Kebijakan yang ditempuh;

1. Meningkatkan Penyediaan Administrasi Perkantoran
2. Meningkatkan Penyediaan Sarana Kerja
3. Meningkatkan Pengadaan Prasarana Pegawai
4. Meningkatkan Pelatihan Bagi Pegawai
5. Meningkatkan Penegakan Disiplin Aparatur

Kebijakan tersebut ditempuh melalui **program**;

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tujuan: Mengoptimalkan pengelolaan administrasi perkantoran dan kinerja internal.

Sasaran: Optimalnya pengelolaan administrasi perkantoran dan kinerja internal.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Tujuan: Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat .

Sasaran: Tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan baik kualitas maupun kuantitas untuk mendukung pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tujuan: Meningkatkan Disiplin Aparatur

Sasaran: Optimalnya kinerja pelayanan pemerintah.

4. Program Fasilitasi Pindah /Purna Tugas Pegawai Negeri Sipil

Tujuan: Meningkatkan Kesejahteraan Purna Tugas Pegawai Negeri Sipil

Sasaran: Meningkatnya Kesejahteraan Purna Tugas Pegawai Negeri Sipil

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Tujuan: Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya aparatur.

Sasaran: Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas sumberdaya aparatur.

6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tujuan: Meningkatkan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Sasaran: Tersedianya pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu.

7.2 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan Kondisi Umum Daerah, Visi dan Misi, Strategi, Arah Kebijakan Keuangan dan Arah Kebijakan Umum yang telah diuraikan di atas dengan memperhatikan Rancangan Renstra masing-masing SKPD, serta guna mencapai sinergitas dan sinkronisasi Kebijakan program dan kegiatan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dengan Pemerintah Kabupaten, maka rumusan program dan kegiatan telah diformulasikan menurut **urusan Pemerintahan, wajib dan pilihan** yang menjadi kewenangan daerah. Kemudian disesuaikan dan dikembangkan guna menjawab tantangan dan kebutuhan daerah yang akan dicapai selang lima tahun ke depan yaitu sebagai berikut :

7.2.1. URUSAN WAJIB

(1) URUSAN PENDIDIKAN

Dengan **Kebijakan** sebagai berikut :

- a. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan
- b. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan
- c. Pemantapan penyelenggaraan pemerintahan yang baik
Penguasaan dan penerapan teknologi informasi guna memperkuat daya saing daerah.
- d. Peningkatan dan penguatan masyarakat dalam partisipasi pendidikan.

Kebijakan ini akan ditempuh melalui **Program:**

1. **Program Pendidikan Anak Usia Dini**

Tujuan: Meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan melalui jalur formal seperti Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA) dan bentuk lain yang sederajat,

Sasaran: Semua anak usia dini memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

2. **Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**

Tujuan: Untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau,

Sasaran: Meningkatnya angka partisipasi kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi sekolah SD Termasuk MI dan Paket A serta SMP, MTs dan Paket B.

3. **Program Pendidikan Non Formal**

Tujuan: Memberikan layanan pendidikan baik untuk laki-laki maupun perempuan sebagai pengganti, penambah dan atau pelengkap pendidikan non formal guna mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan fungsional.

Sasaran: Terwujudnya penguatan kelembagaan sarana dan prasarana pendidikan non formal yang meliputi pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan untuk penduduk dewasa, pendidikan keterampilan, dan pelatihan kerja serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik secara lebih luas dan bervariasi.

4. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Tujuan: Peningkatan kualitas layanan pendidik dengan melakukan pendidikan dan latihan agar memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, pengembangan sistem standarisasi dan sertifikasi profesi pendidik dan penerapan standar profesionalisme dan sistem pemantauan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan yang berbasis kinerja kelas, sekolah atau satuan pendidikan lainnya, serta peningkatan rasio pendidik dan tenaga kependidikan melalui pengangkatan, penempatan, penyebaran pendidik, dan tenaga kependidikan didasarkan pada kualifikasi, jumlah, dan kompetensi.

Sasaran: Peningkatan kualitas layanan pendidik dan peningkatan rasio pendidik dan tenaga kependidikan yang berdampak pada peningkatan kualitas murid.

5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Tujuan: Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di daerah.

Sasaran: Meningkatnya Kinerja Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan terlaksananya pemetaan sarana prasarana pendidikan serta terwujudnya Pengelolaan Pendidikan yang bertaraf Nasional dan Internasional.

(2) URUSAN KESEHATAN

Arah Kebijakan ini akan ditempuh melalui **Program Indikatif:**

1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Tujuan: Melindungi masyarakat dari bahaya obat, makanan dan penyalahgunaan obat dan Napza, dan alat kesehatan.

Sasaran: Terkendalinya penyaluran obat, Napza dan terbebasnya masyarakat dari penyalahgunaan obat, Napza, dan serta alat kesehatan.

2. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Tujuan: Meningkatkan derajat pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Sasaran: Terstandarisasinya pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat.

3. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Tujuan: Meningkatkan pelayanan dan derajat kesehatan penduduk miskin.

Sasaran: Terlayannya dengan baik kesehatan penduduk miskin.

4. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata (Pelayanan Kesehatan Rujukan)

Tujuan: Meningkatkan fasilitas kesehatan bagi masyarakat yang sesuai standar yakni fasilitas pelayanan rujukan.

Sasaran: Meningkatnya ketersediaan fasilitas pelayanan rujukan.

5. Program Pemeliharaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata (Pelayanan Kesehatan Rujukan)

Tujuan: Meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan bagi masyarakat yang sesuai standar fasilitas pelayanan rujukan.

Sasaran: Meningkatnya kualitas fasilitas kesehatan bagi masyarakat sesuai standar fasilitas pelayanan rujukan.

(3) URUSAN PEKERJAAN UMUM

Dengan **Arah Kebijakan** sebagai berikut :

- a. Penyediaan, rehabilitasi, pemeliharaan, dan peningkatan prasarana wilayah guna membuka keterisolasian dan meningkatkan mobilitas antar sentra-sentra ekonomi/produksi;
- b. Penanganan sistem jaringan yang berlum terhubung untuk membuka akses pada daerah terisolir dalam pengembangan wilayah;
- c. Penanganan sistem jaringan drainase serta pembangunan talud pada daerah rawan bencana dan abrasi;
- d. Pengembangan dan peningkatan jaringan irigasi, rawa dan pengairan lainnya;
- e. Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai dan sumber air lainnya
- f. Penanganan infrastruktur pada daerah strategis dan cepat tumbuh;
- g. Pembangunan infrastruktur berbasis penataan ruang untuk mendukung pusat-pusat produksi dan ketahanan pangan, mendukung keseimbangan antara daerah/wilayah, meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman. Meningkatkan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah Kabupaten dan kota kecamatan baik di wilayah daratan maupun pulau-pulau dengan memperhatikan aspek keterpaduan, keterkaitan, keseimbangan perkembangan antar wilayah.

- h. Menata perumahan dan pemukiman serta kawasan kumuh baik di perkotaan, pesisir dan wilayah pulau serta menyediakan kawasan permukiman dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat berpendapatan rendah, serta membantu perbaikan perumahan rakyat yang berpenghasilan rendah.
- i. Menata bangunan perkantoran dalam menunjang optimalisasi pelayanan publik yang disesuaikan dengan tata ruang.

Kebijakan ini akan ditempuh melalui Program Indikatif:

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Tujuan: Mengembangkan jaringan jalan dan jembatan pada daerah-daerah strategis, potensial dan terisolir.

Sasaran: Berkembangnya dan meluasnya jaringan jalan yang menghubungkan pusat produksi dan pemasaran serta menghubungkan wilayah yang sudah berkembang dan wilayah yang relatif tertinggal dan terisolir, serta daerah-daerah potensial.

2. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Tujuan: Mengembangkan jaringan saluran drainase/gorong-gorong dalam menjaga jalan dan jembatan.

Sasaran: Mengendalikan aliran air buangan dan hujan.

3. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Tujuan: Mengembalikan dan menjaga kondisi jalan dan jembatan supaya tetap mantap.

Sasaran: Lancarnya arus lalu lintas barang dan jasa.

4. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan

Tujuan: Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kebinamargaan.

Sasaran: Tersedianya sarana dan prasarana kebinamargaan.

5. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Tujuan: Meningkatkan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.

Sasaran: Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.

6. Program Pengendalian Banjir

Tujuan: Meningkatkan Pengendalian Banjir

Sasaran: Meningkatnya Pengendalian Banjir.

7. Program Pengembangan Wilayah Strategi dan Cepat Tumbuh

Tujuan: Meningkatkan Pengembangan Wilayah Strategi dan Cepat Tumbuh

Sasaran: Pengembangan Wilayah Strategi dan Cepat Tumbuh

8. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Tujuan: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan.

Sasaran: Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Pedesaan.

9. Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi

Tujuan: Meningkatkan Pemberdayaan Jasa Konstruksi Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi

Sasaran: Meningkatnya Pemberdayaan Jasa Konstruksi Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi

10. Program Lingkungan Sehat Perumahan Pengelolaan Sampah Perkantoran

Tujuan: Meningkatkan Lingkungan Sehat Perumahan Pengelolaan Sampah Perkantoran.

Sasaran: Meningkatnya Lingkungan Sehat Perumahan Pengelolaan Sampah Perkantoran

11. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Tujuan: Meningkatkan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.

Sasaran: Meningkatnya Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

12. Program Penataan Bangunan Kawasan Perumahan dan Perkantoran

Tujuan: Meningkatkan Penataan Bangunan Kawasan Perumahan dan Perkantoran

Sasaran: Meningkatnya Penataan Bangunan Kawasan Perumahan dan Perkantoran

13. Program Pemanfaatan Ruang

Tujuan: Meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang melalui rangkaian pembangunan yang memanfaatkan ruang menurut jangka waktu yang ditetapkan di dalam rencana tata ruang untuk membentuk ruang.

Sasaran: Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang yang mengacu pada dokumen rencana tata ruang.

14. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengawasan Pemanfaatan Ruang

Tujuan: Meningkatkan kualitas pengendalian pemanfaatan ruang melalui kegiatan perizinan, pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang sebagai usaha untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud.

Sasaran: Meningkatnya kualitas pengendalian pemanfaatan ruang dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang.

(4) URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL

Adapun **Arah kebijakan** yang ditempuh adalah:

- a. Penguatan organisasi Perencana Pembangunan Daerah.
- b. Meningkatkan kualitas SDM aparatur perencana dalam menyusun kegiatan dan analisis perumusan Kebijakan perencanaan dan strategi pembangunan dan investasi daerah serta penguatan kelembagaan.
- c. Ketersediaan data dan informasi dalam menyusun perumusan Kebijakan perencanaan dan program/kegiatan untuk melaksanakan pembangunan dan investasi daerah.
- d. Penyiapan data dan dokumen dalam usaha optimalisasi target investasi daerah
- e. Membangun/menciptakan sistem koordinasi secara terpadu, bersinergi, tepat dan cepat dengan SKPD, *stakeholder* dan instansi terkait lainnya dalam melaksanakan pembangunan.

Arah kebijakan ini akan ditempuh melalui Program Indikatif :

1. Program Perencanaan Pengembangan Tata Ruang

Tujuan: Meningkatkan pengembangan tata ruang

Sasaran: Terwujudnya pengembangan tata ruang.

2. Program Pengembangan Data/ Informasi

Tujuan: Menyusun dan menyediakan dokumen data dan informasi investasi daerah

Sasaran: Tersedianya berbagai dokumen data dan informasi investasi daerah

3. Program Kerjasama Pembangunan

Tujuan: Meningkatkan kerjasama pembangunan bagi seluruh *stakeholders*.

Sasaran: Terjalannya kerjasama pembangunan bagi seluruh SKPD dan *stakeholders*.

4. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan perencanaan pembangunan Daerah

Tujuan: Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas lembaga perencanaan pembangunan daerah

Sasaran: Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas sumberdaya aparatur perencanaan

5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Tujuan: Menyusun dan menyediakan dokumen perencanaan pembangunan daerah

Sasaran: Tersedianya berbagai dokumen perencanaan pembangunan

6. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Tujuan: Meningkatkan kuantitas dan kualitas dokumen perencanaan ekonomi daerah

Sasaran: Terkordinasinya perencanaan pembangunan ekonomi daerah

7. Program Perencanaan Sosial Budaya

Tujuan: Mewujudkan koordinasi Perencanaan Sosial Budaya

Sasaran: Terjalannya koordinasi Perencanaan Sosial Budaya

8. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Tujuan: Mewujudkan koordinasi promosi dan kerjasama investasi

Sasaran: Terjalannya koordinasi promosi dan kerjasama investasi

(5) URUSAN PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Dengan **Arah kebijakan** sebagai berikut :

- a. Penyediaan dan peningkatan pelayanan jasa melalui upaya pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan yang efektif dan efisien.
- b. Penyediaan aksesibilitas pelayanan transportasi dan menekan serta mengurangi kesenjangan antar wilayah
- c. Mendorong dan menciptakan pengembangan prasarana dan industri jasa transportasi yang dibangun dan dikelola melibatkan pihak swasta.
- d. Peningkatan keselamatan transportasi terpadu dan peningkatan mobilitas dan distribusi barang/orang serta mewujudkan sistem transportasi daerah yang terintegrasi.
- e. Menambah pelayanan pelabuhan sebagai pendukung moda transportasi antar wilayah guna mendorong pelayanan, aktivitas ekonomi dan pariwisata daerah.

f. Pemulihan fungsi prasarana dan sarana transportasi darat serta melengkapi fasilitas terminal.

Arah kebijakan ini akan ditempuh melalui **Program:**

1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.

Tujuan: Meningkatkan pelayanan jasa dan keselamatan terhadap masyarakat pengguna angkutan jalan.

Sasaran: Terpeliharanya kondisi fisik sarana dan prasarana perhubungan.

2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.

Tujuan: Meningkatkan mutu pelayanan angkutan darat dan laut yang optimal

Sasaran: Tercapainya standar mutu pelayanan angkutan darat dan laut

3. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Tujuan: Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana perhubungan

Sasaran: Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan yang memadai

4. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.

Tujuan: Meningkatkan penertiban dan pengaturan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor.

Sasaran: Terinventarisirnya pengoperasian kendaraan motor yang laik jalan.

5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.

Tujuan: Mengembangkan jaringan komunikasi, informasi dan media massa.

Sasaran: Terpenuhinya kebutuhan informasi bagi masyarakat.

(6) URUSAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Dengan **Arah kebijakan** sebagai berikut :

- a. Pengendalian pencemaran lingkungan memenuhi baku mutu dan standar serta peningkatan kapasitas daerah dalam pengendalian pencemaran
- b. Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan dalam membangun kemitraan penataan lingkungan hidup
- c. Pemulihan kondisi lingkungan yang rusak melalui konservasi sumber daya alam
- d. Pembinaan, pendidikan dan penguatan kelembagaan serta penyebarluasan informasi dalam pelestarian lingkungan.

Arah kebijakan ini akan ditempuh melalui **Program:**

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Tujuan : Meningkatkan pengembangan pengelolaan persampahan

Sasaran: Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan.

2. Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup

Tujuan: Melestarikan urusan dan kemampuan sumber alam hayati, non hayati dan lingkungan hidup, dan meningkatkan penanganan lahan kritis dan Meningkatkan pelestarian urusan ekosistem dan mengendalikan kerusakan lingkungan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan hutan, pantai dan laut.

Sasaran: Terlindunginya kawasan-kawasan sumber daya alam dari kerusakan lingkungan dan tercapainya pemulihan urusan lingkungan.

3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Tujuan: Meningkatkan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Sasaran: Meningkatnya Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

4. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Tujuan: Meningkatkan Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Sasaran: Meningkatnya Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

5. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Tujuan: Meningkatkan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Sasaran: Tercapainya Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

6. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Tujuan: Meningkatkan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Sasaran: Tercapainya Kualitas dan Akses Informasi Sumber

Daya Alam dan Lingkungan Hidup

7. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Tujuan: Meningkatkan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Sasaran: Tercapainya Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

(7) URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Dengan **Arah kebijakan** sebagai berikut:

- a. Membentuk dan menata sistem koneksi NIK berbasis SIAK dengan pusat dan lembaga terkait
- b. Memperkuat sistem informasi data kependudukan
- c. Meningkatkan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Arah kebijakan ini akan ditempuh melalui **Program Indikatif :**

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Tujuan: Untuk menata administrasi kependudukan dalam mendorong terakomodasinya hak-hak penduduk, tertib administrasi penduduk, tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat.

Sasaran: Tertatanya administrasi kependudukan serta tercapainya kualitas pendataan penduduk yang lengkap dan sistimatis.

(8) URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

Dengan **Arah kebijakan** sebagai berikut :

- a. Perwujudan kesetaraan dan keadilan gender agar kualitas hidup perempuan dapat ditingkatkan
- b. Penyajian data dan informasi pangarusutamaan gender
- c. Peningkatan partisipasi perempuan dan penanganan anak dalam pembangunan.
- d. Peningkatan akses informasi dan kualitas pelayanan bagi keluarga
- e. Peningkatan pembinaan dan status kesehatan perempuan dan anak
- f. Pembinaan pelayanan KIE dan pelayanan kesehatan reproduksi remaja (KRR)
- g. Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen KB, data serta informasi.

Arah kebijakan ini akan ditempuh melalui **Program Indikatif :**

1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Tujuan: Memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak di berbagai bidang pembangunan.

Sasaran: Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak; 2) menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; 3) terjaminnya keadilan gender dalam berbagai perlindungan, program pembangunan dan Kebijakan publik.

2. Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan

Tujuan: Mewujudkan keserasian Kebijakan di berbagai bidang pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas anak dan perempuan.

Sasaran: Peningkatan kualitas anak dan perempuan serta kemandirian organisasi perempuan.

3. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Tujuan: Meningkatkan peran serta dan kesetaraan gender dalam seluruh proses pembangunan daerah.

Sasaran: Meningkatkan peran serta dan kesetaraan gender dalam seluruh proses pembangunan daerah.

4. Program Keluarga Berencana

Tujuan: Meningkatkan kualitas pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi yang berkualitas.

Sasaran: Tersedianya sarana dan tenaga pelayanan keluarga berencana serta tersedianya alat/obat KB yang memadai. (2) Meningkatnya peserta KB laki-laki. (3) terlaksananya advoksi dan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi).

5. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Tujuan: Meningkatkan Kesehatan Reproduksi Remaja

Sasaran: Meningkatnya Kesehatan Reproduksi Remaja

6. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

Tujuan: Meningkatkan Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

Sasaran: Meningkatnya pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

7. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat

Tujuan : Meningkatkan Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat

Sasaran: Meningkatnya Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat.

8. Program Penyiaran Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

Tujuan: Meningkatkan Penyiaran Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

Sasaran:Meningkatnya Penyiaran Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

9. Program Pengembangan Model, Operasional BKP-Posyandu-Padu

Tujuan: Meningkatkan Pengembangan Model, Operasional BKP-Posyandu-Padu.

Sasaran: Meningkatnya Pengembangan Model, Operasional BKP-Posyandu-Padu.

(9) URUSAN SOSIAL

Dengan **Arah kebijakan** sebagai berikut :

- a. Peningkatan aksesibilitas PMKS dan keluarga rentan untuk mendapat Bansos, Pelayanan rehabilitasi sosial, dan jaminan sosial serta pelayanan dasar lansia
- b. Pemberdayaan bagi keluarga, fakir miskin, komunitas adat terpencil, anak terlantar dan PMKS manula
- c. Peningkatan peran TKSM/relawan, karang taruna, Orsos masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan dan pelayanan sosial
- d. Penyediaan bantuan dasar bagi korban bencana alam dan lainnya.

Arah kebijakan ini akan ditempuh melalui **Program Indikatif** :

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Tujuan: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin

Sasaran: Meningkatnya kualitas dan harkat martabat masyarakat miskin

2. Program pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.

Tujuan: Meningkatkan kualitas Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dan jaminan kesejahteraan social bagi anak terlantar.

Sasaran: Meningkatnya kualitas Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dan jaminan kesejahteraan social bagi anak terlantar.

3. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Tujuan: Meningkatkan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Sasaran: Meningkatkan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

(10) URUSAN PENANGGULANGAN BENCANA

Dengan **Arah kebijakan** sebagai berikut :

- a. Penurunan daerah yang terkena bencana banjir.
- b. Penyediaan bantuan dasar bagi korban bencana alam dan lainnya.

Arah kebijakan ini akan ditempuh melalui **Program Indikatif :**

1. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial

Tujuan: Meningkatkan Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/ Sosial

Sasaran: Terehabilitasinya Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial

2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana

Tujuan: Meningkatkan Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana.

Sasaran: Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana.

3. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Tujuan: Meningkatkan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Sasaran: Meningkatkan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

(11) URUSAN NARKOTIKA

Dengan **Arah kebijakan** sebagai berikut :

- a. Peningkatan penganggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS.
- b. Penurunan angka ketergantungan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS.

Arah kebijakan ini akan ditempuh melalui **Program Indikatif :**

1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Tujuan: Meningkatkan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Sasaran: Meningkatnya ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

2. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS

Tujuan: Meningkatkan Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS

Sasaran: Meningkatnya Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS

(12) URUSAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Arah kebijakan yang ditempuh sebagai berikut :

- a. Peningkatan akses informasi serta data tenaga kerja
- b. Peningkatan pembinaan, pengawasan dan perlindungan serta penyiapan prasarana ketenagakerjaan
- c. Pengembangan kerja sama ketenagakerjaan dalam penurunan angka pengangguran dan penanggulangan kemiskinan
- d. Pendataan dan Pengembangan.
- e. Penyiapan daerah baru bagi transmigrasi

Arah kebijakan ini akan ditempuh melalui **Program Indikatif :**

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga kerja

Tujuan: Meningkatkan profesionalisme tenaga kerja dan aspek-aspek yang mempengaruhi peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Sasaran: Tersedianya tenaga kerja yang berkualitas, produktif dan kompetitif.

2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Tujuan: Mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesempatan kerja baru.

Sasaran: Berkurangnya pengangguran dan meningkatnya kesempatan kerja dalam berbagai bidang usaha, terciptanya tenaga kerja mandiri serta tersedianya sistem informasi dan perencanaan tenaga kerja.

3. Program Perlindungan dan Pengembangan lembaga Ketenagakerjaan

Tujuan: Mewujudkan ketenangan bekerja dan berusaha sehingga tercipta hubungan yang serasi antara pekerja dan pengusaha yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

Sasaran: Meningkatkan peran kelembagaan tenaga kerja di perusahaan, perbaikan kondisi kerja, serta jaminan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja.

4. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Tujuan: Mewujudkan keseimbangan persebaran penduduk melalui pola transmigrasi.

Sasaran: Meningkatnya kualitas SDM Pemda dan masyarakat transmigrasi serta terbukanya lahan permukiman.

(13). URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Arah kebijakan yang ditempuh sebagai berikut :

- a. Peningkatan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan
- b. Peningkatan fasilitas dan promosi produk-produk UKM dan Koperasi
- c. Pemberdayaan usaha mikro dalam mendukung penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah
- d. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan koperasi dan UMKM
- e. Memperluas basis usaha dengan penyederhanaan prosedur dan penyelenggaraan usaha untuk meningkatkan peran IKM
- f. Pengembangan wirausaha baru
- g. Pengembangan IKM melalui pemanfaatan bahan baku berbasis SDA lokal
- h. Peningkatan produktivitas dan kualitas produk yang berpotensi memiliki keuntungan kompetitif.
- i. Peningkatan pengawasan, pembinaan usaha kelembagaan dan kemitraan

Arah kebijakan ini akan ditempuh melalui **Program Indikatif :**

1. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Tujuan: Mengembangkan perilaku kewirausahaan dan berusaha meningkatkan keunggulan kompetitif bagi usaha kecil menengah, yang dapat mendukung pengembangan manajemen dan usaha koperasi.

Sasaran: Berkembangnya pengetahuan dan sikap wirausaha dalam pengelolaan usaha, terciptanya daya saing produk UMKM dan Koperasi serta meningkatnya produktivitas usaha kopersi dan usaha kecil, menengah.

2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM

Tujuan: Mengembangkan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM.

Sasaran: Berkembangnya Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM.

3. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Tujuan: Meningkatkan kapasitas kelembagaan koperasi dengan melakukan berbagai Arah kebijakan dalam menata koperasi.

Sasaran: Terciptanya koperasi yang berkualitas, mandiri dan sehat sehingga dapat mengakses sarana prasarana, pendidikan, pelatihan dan sosialisasi maupun penerapan teknologi untuk mendukung penataan kelembagaan koperasi.

(14) URUSAN PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISITA

Dengan **Arah kebijakan** sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Kebijakan kepemudaan yang serasi di berbagai bidang pembangunan
- b. Meningkatkan pendidikan dan keterampilan bagi pemuda
- c. Meningkatkan kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan bagi pemuda
- d. Meningkatkan budaya dan prestasi Olahraga secara berjenjang termasuk pemanduan bakat, pembibitan dan pengembangan bakat
- e. Menggali dan menyebarluaskan potensi budaya, serta melindungi dan memelihara guna pengembangan dan pemafaatan bagi rakyat
- f. Pembinaan, pengembangan dan kerjasama kebudayaan.
- g. Peningkatan promosi dan pemasaran produk dan lokasi pariwisata
- h. Peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam peningkatan kepariwisataan di daerah
- i. Penataan Objek wisata unggulan
- j. Partisipasi dalam event Festival wisata baik regional maupun nasional

Arah kebijakan ini akan ditempuh melalui **Program Indikatif :**

1. Program Pengembangan Keserasian Kebijakan Kepemudaan

Tujuan: Peningkatan Pengembangan Keserasian Kebijakan Kepemudaan.

Sasaran: Terwujudnya Pengembangan Keserasian Kebijakan Kepemudaan.

2. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Tujuan: Peningkatan Kualitas Pemuda sebagai insan pelopor, penggerak pembangunan, sumber daya manusia yang mampu menghadapi berbagai tantangan dan memanfaatkan peluang untuk berperan serta dalam pembangunan.

Sasaran: Terwujudnya kreativitas pemuda dan inovasi pemuda sebagai wadah penyaluran minat dan bakat serta peningkatan dukungan sarana dan prasarana pembangunan kepemudaan.

3. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda.

Tujuan: Meningkatkan dan mendorong peran pemuda agar mandiri dalam mengembangkan diversifikasi usaha.

Sasaran: Tumbuhnya diversifikasi usaha yang diprakarsai oleh pemuda.

4. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga

Tujuan: Meningkatkan budaya Olahraga, kesehatan jasmani, mental dan rohani masyarakat dan anak didik mulai dari pendidikan dasar menengah, hingga pendidikan tinggi serta meningkatkan kegiatan Olahraga termasuk Olahraga masyarakat dan Olahraga tradisional.

Sasaran: Terwujudnya pemanduan bakat dan pembibitan Olahraga sejak dini.

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Tujuan: Tingkat kemampuan generasi muda dibidang Olahraga.

Sasaran: Terwujudnya pemanduan bakat dan pembibitan olahraga sejak dini.

6. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Tujuan: Meningkatkan apresiasi dan kecintaan masyarakat terhadap budaya dan Produk daerah.

Sasaran: Terwujudnya pelestarian kekayaan budaya yang meliputi sejarah kepurbakalaan, benda cagar budaya dan naskah-naskah kuno.

7. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Tujuan: Menciptakan keserasian hubungan antar unit sosial dan antar budaya dalam rangka menurunkan ketegangan dan ancaman konflik antar etnis/daerah serta mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana budaya serta memberikan penghargaan bagi pelaku budaya.

Sasaran: Terwujudnya rasa toleransi multikultural dalam wujud ikatan antar unit sosial budaya dan etnis serta menumbuhkan rasa persaudaraan yang tinggi.

8. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Tujuan: Mempublikasikan Potensi Obyek Wisata menjadi Daerah tujuan wisata.

Sasaran: Meningkatkan Potensi Obyek Wisata.

9. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Tujuan: Peningkatan kunjungan wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara.

Sasaran: Terjalinnnya hubungan destinasi wisata antar daerah maupun antar negara.

10. Program Pengembangan Kemitraan

Tujuan: Mendorong peran swasta untuk lebih optimal dalam mengembangkan pariwisata.

Sasaran: Meningkatnya peran swasta dalam mengembangkan pariwisata.

(15) URUSAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Dengan **Kebijakan** sebagai berikut :

- a. Memantapkan kapasitas kredibilitas pemerintah lembaga-lembaga politik dan demokrasi serta pranata lokal/adat dalam memainkan peran sebagai fasilitator atau mediator konflik
- b. Memperkuat kerukunan dan perdamaian serta rekonsiliasi pasca pilkada di daerah
- c. Penegakan peraturan daerah (PERDA) khususnya yang berkaitan dengan ketertiban umum, pajak dan retribusi daerah.
- d. Memperkuat pengamanan Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur propinsi Sulteng.

Arah kebijakan ini akan ditempuh melalui **Program Indikatif :**

1. Program Wawasan Kebangsaan

Tujuan: Meningkatkan Wawasan Kebangsaan

Sasaran: Berkembanya Wawasan Kebangsaan

2. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Tujuan: Meningkatkan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Sasaran: Terjalinnnya Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

3. Program Pendidikan Politik Masyarakat

Tujuan: Meningkatkan kesadaran politik masyarakat

Sasaran: Tumbuhnya kesadaran politik masyarakat

4. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Tujuan: Meningkatkan rasa aman dan nyaman terhadap lingkungan

Sasaran: Terciptanya rasa aman dan nyaman terhadap lingkungan

5. Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Tujuan: Meningkatkan kemampuan Satuan linmas dan Satgas Polisi Pamong Praja serta Terlatihnya satuan Linmas dan satgas Polisi Pamong Praja

Sasaran: Terpeliharanya suasana kamtibmas dan berkurangnya tindak kriminal

(16) URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Dengan **Arah kebijakan** sebagai berikut :

- a. Penggunaan teknologi informasi dan database
- b. Pemantapan, pengembangan dan kordinasi antar pemerintah daerah
- c. Optimalisasi dan pemantapan peran serta lembaga perwakilan rakyat daerah dan pelayanan kedinasan kepala daerah serta wakil kepala daerah
- d. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa dengan pelayanan prima
- e. Peningkatan kemampuan, ketatalaksanaan, pengawasan keuangan daerah

Arah kebijakan ini akan ditempuh melalui **Program Indikatif** :

1. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Tujuan: Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi

Sasaran: Tersedianya sistem informasi layanan publik

2. Program Peningkatan Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah

Tujuan: Meningkatkan dan mengefektifkan kerjasama antar pemerintah daerah

Sasaran: Terjalinnnya kerjasama antar pemerintah daerah

3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Tujuan: Meningkatnya Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Sasaran: Meningkatnya Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

4. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Tujuan: Meningkatkan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Sasaran: Meningkatkan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

5. Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Tujuan: Mengoptimalkan Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Sasaran: Meningkatkan Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

6. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

Tujuan: Meningkatkan Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

Sasaran: Meningkatkan Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

7. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Tujuan: Meningkatkan peran pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

Sasaran: Optimalnya peran pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

8. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Tujuan: Meningkatkan kualitas sistem pengawasan internal

Sasaran: Terciptanya optimalisasi sistem pengawasan internal

9. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Tujuan: Melakukan penataan peraturan perundang-undangan

Sasaran: Tertatanya peraturan perundang-undangan

10. Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Tujuan: Menertibkan dan meningkatkan pengaturan sarana dan prasarana pada daerah otonomi baru .

Sasaran: Meningkatkan pengaturan sarana dan prasarana pada daerah otonomi baru.

11. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Tujuan: Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Sasaran: Tersedianya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

12. Program Peningkatan Kualitas Humas dan Media Massa

Tujuan: Meningkatkan Kualitas Humas dan Media Massa

Sasaran: Meningkatnya Kualitas Humas dan Media Massa

13. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian Perkebunan)

Tujuan: Meningkatkan Ketahanan Pangan (Pertanian Perkebunan)

Sasaran: Tercapainya Ketahanan Pangan (Pertanian Perkebunan)

14. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Tujuan: Meningkatkan perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Sasaran: Tercapainya perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

15. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Tujuan: Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Sasaran: Optimalisasi peran dan urusan lembaga perwakilan rakyat daerah

16. Program Pemanfaatan Peraturan Perundang-undangan

Tujuan: Meningkatkan Pemanfaatan Peraturan Perundang-undangan

Sasaran: Termanfaatkannya Peraturan Perundang-undangan

17. Program Kerjasama Informasi dan Media Masa

Tujuan: Meningkatkan Kerjasama Informasi dan Media Masa

Sasaran: Terjalinnnya Kerjasama Informasi dan Media Masa

18. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tujuan : Mengoptimalkan sistem penatausahaan keuangan daerah

Sasaran : Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah

19. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Tujuan : Melaksanakan penataan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan pemerintahan desa

Sasaran: Terlaksananya standar pengelolaan keuangan desa sesuai standar akuntansi keuangan

(17) URUSAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Dengan **Arah kebijakan** sebagai berikut :

- a. Peningkatan kinerja aparat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kepegawaian
- b. Meningkatkan pengelolaan dan akurasi data sumber daya manusia aparatur melalui pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian
- c. Meningkatkan jumlah aparatur daerah yang memahami dan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* secara konsisten dan berkelanjutan pada semua tingkat dan lini pemerintahan dan pada semua kegiatan lingkup kepegawaian

Arah kebijakan ini akan ditempuh melalui **Program Indikatif :**

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Tujuan : Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur

Sasaran: Terselenggaranya diklat penjenjangan dan teknis Pegawai Negeri Sipil daerah

2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Tujuan: Menciptakan standar operasional dan prosedur pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil

Sasaran: Tersedianya standar operasional dan prosedur pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil

(18) URUSAN INSPEKTORAT

Dengan **Arah kebijakan** sebagai berikut :

- a. Peningkatan kinerja aparat dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan di bidang pemerintahan dan pembangunan.
- b. Peningkatan jumlah aparatur daerah yang memiliki kemampuan pengawasan internal yang baik.

Arah kebijakan ini akan ditempuh melalui **Program Indikatif :**

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

Tujuan: Meningkatkan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

Sasaran: Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Tujuan: Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Sasaran: Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

(19) URUSAN KORPRI

Dengan **Arah kebijakan** sebagai berikut :

- a. Peningkatan kinerja aparat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kepegawaian
- b. Meningkatkan pengelolaan dan akurasi data sumber daya manusia aparatur melalui pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian
- c. Meningkatkan jumlah aparatur daerah yang memahami dan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* secara konsisten dan berkelanjutan pada semua tingkat dan lini pemerintahan dan pada semua kegiatan lingkup kepegawaian

Arah kebijakan ini akan ditempuh melalui **Program Indikatif :**

1. Program Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS

Tujuan: Meningkatkan Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS

Sasaran: Terfasilitasinya Pindah/Purna Tugas PNS

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Tujuan: Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Sasaran: Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

(20) URUSAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUH

Arah Kebijakan ini akan ditempuh melalui **Program Indikatif :**

1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Tujuan: Memfasilitasi peningkatan pendapatan petani melalui pemberdayaan, peningkatan akses terhadap sumber daya usaha pertanian, pengembangan kelembagaan dan perlindungan terhadap petani serta meningkatkan ketahanan pangan dan gizi melalui pendaya gunaan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal.

Sasaran: Meningkatnya kapasitas dan posisi tawar petani, semakin kokohnya kelembagaan petani; meningkatnya akses petani terhadap sumberdaya produktif; meningkatnya pendapatan serta penanganan daerah rawan pangan (kelompok afinitas).

2. Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian Perkebunan)

Tujuan: Memberdayakan aparat dan masyarakat agar mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dikuasainya untuk mewujudkan ketahanan pangan secara berkelanjutan.

Sasaran: Tercapainya ketersediaan pangan daerah, regional, nasional dan rumah tangga yang cukup aman dan halal, meningkatnya keragaman produksi dan

konsumsi masyarakat serta meningkatnya kemampuan.

3. Program Peningkatan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Perkebunan Lapangan.

Tujuan: Meningkatkan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Perkebunan Lapangan.

Sasaran: Meningkatnya Peningkatan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Perkebunan Lapangan.

(21) URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Dengan **Arah kebijakan** sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat perdesaan dalam menangkap peluang pengembangan ekonomi serta memperkuat kelembagaan
- b. Peningkatan kersediaan infrastruktur perdesaan dengan pelibatan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pembangunan, pemeliharaan serta pengawasan.

Arah kebijakan ini akan ditempuh melalui **Program Indikatif :**

1. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Tujuan: Meningkatkan Perbaikan Gizi Masyarakat.

Sasaran: Meningkatnya Perbaikan Gizi Masyarakat

2. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Tujuan: Terciptanya kebangkitan keberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan di pedesaan.

Sasaran: Meningkatnya keberdayaan masyarakat di pedesaan

3. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.

Tujuan: Munculnya berbagai lembaga ekonomi yang dapat mewadahi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Sasaran: Meningkatnya jumlah lembaga ekonomi yang dapat membangkitkan perekonomian masyarakat.

4. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Tujuan: Adanya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Sasaran: Meningkatnya peran serta masyarakat dalam program pembangunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

5. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

Tujuan: Memperbaiki kapasitas aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan tugas yang menunjang pembangunan daerah

Sasaran: Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan tugas yang menunjang pembangunan daerah.

6. Program Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Tujuan: Meningkatkan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Sasaran: Meningkatnya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.

(22) URUSAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI DAERAH

Kebijakan ini akan ditempuh melalui **Program** Indikatif:

1. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Tujuan: Memperbaiki sistem administrasi kearsipan daerah

Sasaran: Tertatanya sistem administrasi kearsipan daerah

2. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Tujuan: Mengamankan dokumen arsip daerah

Sasaran: Terdokumentasinya arsip daerah dengan baik

3. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

Tujuan: Penataan sarana dan prasarana kearsipan secara rutin dan berkala

Sasaran: Terpeliharanya sarana dan prasarana kearsipan

4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Tujuan: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

Sasaran: Tersusun dan tersedianya layanan Informasi

5. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Tujuan: Untuk meningkatkan pemberdayaan dan arsip sebagai pusat pembelajaran masyarakat.

Sasaran: Tersedianya sarana dan prasarana, bahan pustaka, SDM layanan yang berkualitas dan terciptanya masyarakat yang gemar membaca.

7.2.2. URUSAN WAJIB

(1) URUSAN PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Dengan **Arah kebijakan** sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kemampuan Petani dan Penguatan Lembaga Pendukungnya
- b. Peningkatan dukungan Pemerintah Daerah dalam menjaga stabilitas keluarga dan ketersediaan pangan
- c. Perluasan akses petani untuk pengembangan usaha melalui teknologi, informasi serta penyediaan sarana dan prasarana pertanian (Alsintan).
- d. Peningkatan promosi dan pemasaran hasil produksi pertanian yang berbasis sumber daya lokal.
- e. Peningkatan produktivitas, produksi dan daya saing produksi
- f. Peningkatan upaya pencegahan dan penyembuhan penyakit ternak.

Arah kebijakan ini akan ditempuh melalui **Program Indikatif** :

1. **Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.**

Tujuan: Memfasilitasi peningkatan pendapatan petani melalui pemberdayaan, peningkatan akses terhadap sumber daya usaha pertanian, pengembangan kelembagaan dan perlindungan terhadap petani serta meningkatkan ketahanan pangan dan gizi melalui pendaya gunaan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal.

Sasaran: Meningkatkan kapasitas dan posisi tawar petani, semakin kokohnya kelembagaan petani; meningkatkannya akses petani terhadap sumberdaya produktif; meningkatkannya pendapatan serta penanganan daerah rawan pangan (kelompok afinitas).

2. **Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian Perkebunan)**

Tujuan: Memfasilitasi terjaminnya masyarakat untuk memperoleh pangan yang cukup setiap saat, sehat dan halal baik aspek kualitas maupun kuantitas yang berkaitan dengan keterjangkauan dan daya beli masyarakat.

Sasaran: Tercapainya ketersediaan pangan daerah, regional, nasional dan rumah tangga yang cukup, aman dan halal; meningkatkannya keragaman produksi dan konsumsi pangan masyarakat; meningkatkannya kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalah kerawanan pangan.

3. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan

Tujuan: Memfasilitasi peningkatan pemasaran hasil pertanian melalui penyediaan sarana prasarana pasar pertanian, penumbuhan industri pengolahan hasil pertanian di perdesaan untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah hasil pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran: Meningkatnya industri pengolahan skala rumah tangga dan kecil yang didukung oleh industri pengolahan skala menengah dan besar; tersedianya sarana prasarana pemasaran hasil produksi hasil pertanian; meningkatnya mutu, efisiensi dan pemasaran hasil produksi pertanian

4. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Tujuan: Meningkatkan produksi pertanian dan pengolahan hasil produksi yang efisien, maju dan kompetitif melalui diseminasi dan inovasi teknologi pertanian yang berorientasi pasar dan berbasis sumber daya lokal, pengembangan diversifikasi teknologi pengolahan hasil untuk menghasilkan diversifikasi produk, dan meminimalisir kehilangan hasil.

Sasaran: Meningkatnya produksi pertanian; tersedianya sarana prasarana teknologi produksi dan pengolahan spesifik lokasi; meningkatnya mutu dan kualitas produksi pertanian

5. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Tujuan: Memfasilitasi berkembangnya usaha pertanian/perkebunan agar menghasilkan produksi yang optimal, efektif dan efisien menghasilkan produk pertanian dan perkebunan yang berkualitas serta memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi baik di pasar domestik maupun pasar internasional.

Sasaran: Meningkatnya jumlah dan kualitas produksi pertanian/ perkebunan yang memiliki nilai tambah dan daya saing; meningkatnya pengetahuan petani/keompok tani dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi pertanian/ perkebunan; Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian/perkebunan.

6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Tujuan: Meningkatkan derajat kesehatan hewan, meningkatkan derajat kesehatan lingkungan budidaya ternak, meningkatkan derajat kesehatan, keamanan dan kehalalan serta kemurnian produk-produk asal ternak dan mempertahankan wilayah Kabupaten Parigi Moutong tetap bebas dari penyakit hewan menular penting dan mencegah masuknya penyakit baru yang berasal dari luar daerah.

Sasaran: Terciptanya kondisi ternak yang sehat (aman dari infeksi dan penyakit); terciptanya kondisi lingkungan budidaya ternak yang sehat; meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu hasil ternak yang sehat, halal dan aman dikonsumsi manusia.

7. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Tujuan: Untuk mengembangkan fasilitas bibit ternak melalui penyediaan pejantan unggul, penyediaan sarana kawin suntik, penyediaan calon induk yang produktif, serta penyediaan sarana dan prasarana penangkaran yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah guna penyediaan bibit ternak unggul bagi masyarakat penyediaan sarana pakan ternak berupa bibit HMT unggul, lahan penggembalaan dan lahan HMT, penyediaan pakan tambahan (konsentrat dan remix), dan penyediaan sarana teknologi pengolahan pakan ternak dari limbah jerami dan limbah hasil perkebunan lainnya; serta penyediaan alsintan peternakan.

Sasaran: Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu/kualitas ternak; tersedianya bibit ternak unggul dan bermutu; dan berkembangnya teknologi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; dan meningkatnya kemandirian kelompok petani ternak.

(2) URUSAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Dengan **Arah kebijakan** sebagai berikut:

- a. Peningkatan pemeliharaan hutan sebagai salah satu fungsi daya dukung keseimbangan alam
- b. Peningkatan partisipatif masyarakat dalam pengembangan sumber daya hutan
- c. Pencegahan dan penanggulangan masalah pengelolaan hutan dan hasil hutan
- d. Pengembangan usaha perhutanan rakyat.

Arah kebijakan ini akan ditempuh melalui **Program Indikatif** :

1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.

Tujuan: Memfasilitasi peningkatan pendapatan petani melalui pemberdayaan, peningkatan akses terhadap sumber daya usaha pertanian, pengembangan kelembagaan dan perlindungan terhadap petani serta meningkatkan ketahanan pangan dan gizi melalui pendaya gunaan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal.

Sasaran: Meningkatkan kapasitas dan posisi tawar petani, semakin kokohnya kelembagaan petani; meningkatnya akses petani terhadap sumberdaya produktif; meningkatnya pendapatan serta penanganan daerah rawan pangan (kelompok afinitas).

2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian Perkebunan)

Tujuan: Memfasilitasi terjaminnya masyarakat untuk memperoleh pangan yang cukup setiap saat, sehat dan halal baik aspek kualitas maupun kuantitas yang berkaitan dengan keterjangkauan dan daya beli masyarakat.

Sasaran: Tercapainya ketersediaan pangan daerah, regional, nasional dan rumah tangga yang cukup, aman dan halal; meningkatnya keragaman produksi dan konsumsi pangan masyarakat; meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalah kerawanan pangan.

3. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan

Tujuan: Memfasilitasi peningkatan pemasaran hasil pertanian melalui penyediaan sarana prasarana pasar pertanian, penumbuhan industri pengolahan hasil pertanian di perdesaan untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah hasil pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran: Meningkatkan industri pengolahan skala rumah tangga dan kecil yang didukung oleh industri pengolahan skala menengah dan besar; tersedianya sarana prasarana pemasaran hasil produksi hasil pertanian; meningkatnya mutu, efisiensi dan pemasaran hasil produksi pertanian

4. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Tujuan: Meningkatkan produksi pertanian dan pengolahan hasil produksi yang efisien, maju dan kompetitif melalui diseminasi dan inovasi teknologi pertanian yang berorientasi pasar dan berbasis sumber daya lokal, pengembangan diversifikasi teknologi pengolahan hasil untuk menghasilkan diversifikasi produk, dan meminimalisir kehilangan hasil.

Sasaran: Meningkatnya produksi pertanian; tersedianya sarana prasarana teknologi produksi dan pengolahan spesifik lokasi; meningkatnya mutu dan kualitas produksi pertanian

5. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Tujuan: Memfasilitasi berkembangnya usaha pertanian/perkebunan agar menghasilkan produksi yang optimal, efektif dan efisien menghasilkan produk pertanian dan perkebunan yang berkualitas serta memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi baik di pasar domestik maupun pasar internasional.

Sasaran: Meningkatnya jumlah dan kualitas produksi pertanian/ perkebunan yang memiliki nilai tambah dan daya saing; meningkatnya pengetahuan petani/keompok tani dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi pertanian/perkebunan; Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian/perkebunan.

6. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Tujuan: Meningkatkan dan menjaga keseimbangan pemanfaatan dan kelestarian sumber daya hutan.

Sasaran: Meningkatnya peran serta masyarakat/petani dalam pembangunan kehutanan; tertatanya batas kawasan hutan; dan meningkatnya usaha kehutanan

7. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Tujuan: Memulihkan kondisi biofisik lahan kritis.

Sasaran: Meningkatnya fungsi ekologis hutan dan lahan, terpeliharanya sumber air bersih bagi masyarakat dan tersedianya bibit tanaman kehutanan.

(3) URUSAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

Dengan Arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Pengawasan dan pengendalian serta penataan kawasan atau lokasi penambangan bahan energi dan sumberdaya mineral di

- daerah
- b. Kerjasama dengan pihak swasta dalam rangka mengembangkan kerjasama dibidang sumber daya mineral.
 - c. Koordinasi dan peningkatan pelayanan ketenagalistrikan di daerah.

Arah kebijakan ini akan ditempuh melalui **Program Indikatif :**

1. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan.

Tujuan: Meningkatkan pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan.

Sasaran: Terarahnya pengelolaan usaha pertambangan secara berkelanjutan dan meningkatnya pendapatan asli daerah.

2. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

Tujuan: Meningkatkan ketersediaan tenaga listrik untuk masyarakat, industri secara umum serta daerah terpencil dan kepulauan.

Sasaran: Terpenuhinya kebutuhan energi bagi masyarakat dan industri yang bersumber dari PLN maupun sumber energi alternatif lainnya.

3. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Minyak dan Gas Bumi

Tujuan: Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Bidang Minyak dan Gas Bumi.

Sasaran: Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Bidang Minyak dan Gas Bumi.

4. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral dan Air Tanah

Tujuan: Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral dan Air Tanah

Sasaran: Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral dan Air Tanah

(4) URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dengan **Arah kebijakan** sebagai berikut :

- a. Mengelola sumber daya kelautan termasuk membangun sistem pengendalian dan pengawasan.
- b. Mengendalikan pencemaran.
- c. Menjalin kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan teluk tomini.
- d. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan peraturan-perundangan.
- e. Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau air tawar

dan pembudidayaan ikan serta pengembangan pemanfaatan sumber daya perairan umum.

- f. Percepatan pengembangan usaha perikanan yang maju dan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang memadai.

Arah kebijakan ini akan ditempuh melalui **Program Indikatif :**

1. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Tujuan: Meningkatkan kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir

Sasaran: Meningkatnya pemberdayaan masyarakat pesisir skala mikro khususnya koperasi LEPP-M3/Koperasi Perikanan dan Koperasi Usaha Mikro yang berorientasi pada usaha kelautan dan perikanan.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan

Tujuan: Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan

Sasaran: Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan.

3. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Tujuan: Meningkatkan produksi budidaya perikanan.

Sasaran: Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan budidaya secara bertanggungjawab dan ramah lingkungan serta berorientasi pada pembangunan berbasis teknologi terapan.

4. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Tujuan : Meningkatkan produksi penangkapan ikan.

Sasaran: Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap yang mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan.

5. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.

Tujuan : Mengoptimalkan pengelolaan dan pemasaran produksi ikan.

Sasaran: Optimalnya pengelolaan dan pemasaran produksi ikan.

6. Program Pengelolaan Sumber Daya Laut Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil.

Tujuan : Percepatan pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan.

Sasaran: Pemanfaatan kawasan yang sesuai RTRWK dan daya dukung Lingkungan.

(5) URUSAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Dengan **Arah kebijakan** sebagai berikut :

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang pengembangan perindustrian dan perdagangan.
- b. Meningkatkan promosi dan jaringan pemasaran hasil industri dan perdagangan.
- c. Menciptakan iklim dan aturan daerah yang mendorong perkembangan industri dan perdagangan.
- d. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja industri dan perdagangan yang memiliki daya saing.

Arah kebijakan ini akan ditempuh melalui **Program Indikatif :**

1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Tujuan: Meningkatkan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Sasaran: Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

2. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Tujuan: Meningkatkan Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Sasaran: Meningkatnya Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

3. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri

Tujuan: Meningkatkan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri.

Sasaran: Meningkatnya Efisiensi Perdagangan dalam Negeri.

4. Program Pembinaan Perdagangan Kaki Lima dan Asongan

Tujuan: Meningkatkan Pembinaan Perdagangan Kaki Lima dan Asongan

Sasaran: Meningkatnya Pembinaan Perdagangan Kaki Lima dan Asongan

5. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

Tujuan: Meningkatkan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

Sasaran: Meningkatnya Kapasitas Iptek Sistem Produksi

6. Program Peningkatan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Tujuan: Meningkatkan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Sasaran: Meningkatnya Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

7. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Tujuan: Meningkatkan Kemampuan Tehnologi Industri

Sasaran: Meningkatnya Kemampuan Tehnologi Industri.

Tabel 7.1
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
Kabupaten Parigi Moutong 2013-2018

MISI 1: Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Target		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
					Tahun Awal 2012	Tahun Akhir 2018				
1 Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional dan berkinerja tinggi	1 Meningkatnya kualitas SDM aparatur mencapai 60%	1 Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur	Perbaikan sistem penerimaan/rekrutment aparatur	1 Persentase PNS yang tamat Pendidikan sesuai jenjang Pendidikan	50%	70%	Program Fasilitasi pindah/ purna tugas PNS	Kepegawaian	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Badan Kepegawaian Daerah	Semua SKPD/Dinas/Badan, Seluruh kecamatan/Desa/Kelurahan
				2 Persentase PNS yang telah mengikuti Diklat Struktural dan fungsional	60%	80%	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program pembinaan dan pengembangan aparatur Program pendidikan kedinasan, Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Target		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
					Tahun Awal 2012	Tahun Akhir 2018				
	2 Meningkatkan kedisiplinan SDM aparatur hingga mencapai 90%	2 Meningkatkan efektivitas kinerja SDM aparatur	Penegakan sistem <i>reward and punishment</i> pegawai	1 Persentase PNS yang melakukan pelanggaran disiplin 2 Tingkat layanan administrasi yang tepat waktu	50%	30%	Program peningkatan disiplin aparatur Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Kepegawaian	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Badan Kepegawaian Daerah, Satpol PP	Semua SKPD/Dinas/Badan, Seluruh kecamatan/Desa/Kelurahan
	3 Terwujudnya peningkatan pelayanan publik mencapai level "memuaskan"	3 Meningkatkan profesionalisme SDM pada semua instansi/SKPD yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat	Penyediaan fasilitas kerja pegawai yang memadai Optimalisasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)	1 Indeks kepuasan pelayanan publik	Belum terukur	Memuaskan	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemerintahan Umum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Badan Kepegawaian Daerah	Semua SKPD/Dinas/Badan, Seluruh kecamatan/Desa/Kelurahan
2 Mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien	1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah mencapai level "rata-rata baik" untuk seluruh SKPD	1 Meningkatkan kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan dan akuntabel	Peningkatan nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	1 Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah	Nilai LAKIP: C	Nilai LAKIP: CC	Program peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH	Keuangan	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Semua SKPD/Dinas/Badan/Kecamatan/Desa/Kelurahan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Target		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
					Tahun Awal 2012	Tahun Akhir 2018				
	2 Mempertahankan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	2 Meningkatkan profesionalisme pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, dan optimalisasi pendapatan daerah	Meningkatkan opini BPK dari opini WDP menjadi opini WTP	Opini hasil pemeriksaan oleh BPK	WDP	WTP	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program fasilitasi pengelolaan keuangan desa Program pengawasan internal dan pengendalian pengawasan kebijakan Program pembinaan pengembangan aparatur	Keuangan	DPPKAD, Inspektorat Daerah, Bappeda	Semua SKPD/Dinas/Badan Semua kecamatan/Desa/Kelurahan
		3 Penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan pendapatan, belanja dan asset daerah dalam rangka menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan asset daerah kepada publik	Peningkatan kemampuan /kompetensi sumberdaya aparatur dalam penatausahaan keuangan daerah Pengembangan dan penyempurnaan sistem (sarana) pengelolaan keuangan daerah Penyusunan regulasi	Persentase peningkatan PAD	Rp. 28 milyar	Rp. 50 milyar- Rp. 70 milyar	Program Peningkatan pengembangan keuangan daerah	Keuangan	DPPKAD, Inspektorat Daerah, Bappeda	Semua SKPD/Dinas/Badan, Seluruh kecamatan/Desa/Kelurahan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Target		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
					Tahun Awal 2012	Tahun Akhir 2018				
			pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah							

MISI 2 ; Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, keimanan dan ketakwaan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Target		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
					Tahun Awal 2012	Tahun Akhir 2018				
1. Meningkatkan kualitas pendidikan	1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia mencapai 72-73	1. Meningkatkan IPM melalui perbaikan pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat	1. Layanan pendidikan gratis bagi masyarakat miskin 2. Penyediaan dan pemerataan fasilitas kesehatan yang memadai khususnya di daerah-daerah terisolir Prioritas anggaran pendidikan dan	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,28	72-73	Program Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Program pengembangan SDM Pendidikan Program perbaikan gizi masyarakat Program pengembangan SDM kesehatan	Pendidikan Kesehatan Ekonomi	Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan Dinas Pertanian dan Peetrnakan Bappeda	Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh, Seluruh kecamatan/ Desa/ Kelurahan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Target		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
					Tahun Awal 2012	Tahun Akhir 2018				
			kesehatan				Program pemberdayaan ekonomi rakyat			
	2 . Meningkatnya angka melek huruf mencapai 95%-96%	1 . Mengoptimalkan program Paket A, B dan C 2. Meningkatkan budaya baca masyarakat 3. Mengurangi angka putus sekolah	1 . Prioritas anggaran pada layanan pendidikan formal dan informal, khususnya penuntasan buta aksara 2. Pemerataan tenaga kependidikan di seluruh wilayah Kabupaten Parigi Moutong	2 . Angka melek huruf	93,98	95-96	Program pendidikan non formal Program manajemen pelayanan pendidikan Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Pendidikan	Dinas Pendidikan	Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Bappeda, Badan Perpustakaan dan Dokumentasi Daerah, Seluruh kecamatan/ Desa/Kelurahan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Target		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
					Tahun Awal 2012	Tahun Akhir 2018				
	3 . Meningkatnya rata-rata lama sekolah mencapai 9-10 tahun	1 . Meningkatkan efektivitas pembiayaan pendidikan 2 . Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan dasar	1 . Peningkatan alokasi anggaran bidang pendidikan 2 . Pemerataan akses layanan pendidikan hingga ke daerah-daerah terpencil dan kantong-kantong kemiskinan	3 . Angka rata-rata lama sekolah -	7,17	9-10	Program Wajib Belajar 9 tahun Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan	Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Bappeda, Seluruh kecamatan/Desa/Kelurahan
	4 . Meningkatnya angka partisipasi kasar (APK)	1 . Meningkatkan kualitas SDM tenaga pendidik	1 . Prioritas pembangunan infrastruktur pendidikan	4 . Angka partisipasi kasar (APK), yang terdiri dari:	-		Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan	Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Bappeda, Seluruh kecamatan/Desa/Kelurahan
		2 . Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai	2 . Pemerataan dan perluasan akses pendidikan tingkat SMP dan SMA	-	APK SD	102,54	106-107	Program manajemen pelayanan pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Target		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
					Tahun Awal 2012	Tahun Akhir 2018				
										Bappeda, Seluruh kecamatan/ Desa/ Kelurahan
		3. Meningkatkan kompetensi peserta didik melalui bimbingan	3. Peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik SMP	- APK SMP	76,02	77-78	Program WAJAR 9 tahun	Pendidikan	Dinas Pendidikan	Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Bappeda
		4. Meningkatkan kualitas SDM tenaga kependidikan SMA	4. Prioritas anggaran pendidikan khususnya di daerah terpencil dan terisolasi	- APK SMA	61,95	67-68	Program pendidikan menengah	Pendidikan	Dinas Pendidikan	Sekab/ Bappeda
	5. Meningkatnya angka pendidikan yang ditamatkan	1. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan	1. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	1. Angka pendidikan yang ditamatkan 2. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah -SD 3. SMP SMA 4. Rasio guru terhadap	75,65% 47,51 30,42%	80% 51% 35%	Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan	Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Bappeda, Seluruh kecamatan/

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Target		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
					Tahun Awal 2012	Tahun Akhir 2018				
				murid -SD -SMP -SMA	54.69 77,76 78	59-60 78-79 83-84	Program manajemen pelayanan pendidikan			
				5 Rasio guru terhadap murid per kelas -Pendidikan dasar -SMA	54,48 35	49-50 31-30	Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun			
				6 Persentase sekolah dalam kondisi baik -SD -SMP -SMA	78% 60% 17%	95% 90% 43%				
	6 . Meningkatkan angka partisipasi murni (APM)	1 . Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai 2. Meningkatkan layanan dan mutu pendidikan	1 . Pemerataan akses layanan pendidikan 2. Pemerataan tenaga pendidik pada semua jenjang pendidikan	1 . Angka Partisipasi Murni (APM)	SD 91,92 SMP 50,59 SMA 48,78	SD 93-94 SMP 61-62 SMA 52-53		Pendidikan	Dinas Pendidikan	Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Bappeda, Seluruh kecamatan/ Desa/Kelurahan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Target		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
					Tahun Awal 2012	Tahun Akhir 2018				
		3. Meningkatkan kualitas tenaga kependidikan dan peserta didik								
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1. Meningkatnya usia harapan hidup mencapai 67 - 68 tahun	- Meningkatkan Kemudahan dan Kemampuan mengakses kesehatan yang bermutu secara adil dan merata bagi masyarakat, agar hidup dalam lingkungan sehat, serta berperilaku hidup bersih dan sehat	- Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	1. Angka usia harapan hidup 2. Rasio posyandu per satuan balita 3. Rasio puskesmas, Pustu dan Polindes per satuan penduduk 4. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk 5. Rasio dokter per satuan penduduk 6. Rasio tenaga medis per	65,79 8.64	67-68 5-6	Program standarisasi pelayanan kesehatan Program pelayanan kesehatan penduduk miskin Program pemeliharaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit Program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Bappeda, Seluruh kecamatan/Desa/Kelurahan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Target		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
					Tahun Awal 2012	Tahun Akhir 2018				
				satuan penduduk			pembantu dan jaringannya Program pengembangan lingkungan sehat			
	2 . Meningkatnya kelangsungan hidup bayi	- Meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak/ bayi	- Peningkatan pelayanan kesehatan khususnya bagi ibu dan anak/bayi	Angka kelangsungan hidup bayi Angka Kunjungan Bayi Angka Kematian Ibu	65,47 90%	70-71 95% Menurun	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat; Program upaya kesehatan masyarakat Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB, Seluruh kecamatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Target		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
					Tahun Awal 2012	Tahun Akhir 2018				
	3. Menurunnya balita gizi buruk menjadi 1 - 0%	- Meningkatkan akses layanan kesehatan dan pendidikan kesehatan masyarakat	- Pemerataan akses layanan kesehatan dan peningkatan pendidikan tentang kesehatan	- Persentase balita gizi buruk	3%	1-0%	Program perbaikan gizi masyarakat Program peningkatan ketahanan pangan	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB; Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, Seluruh kecamatan/
3.	Meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan anak Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan	Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam partai politik, birokrasi pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan Memperkuat pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah Menurunkan kekerasan dan eksploitasi terhadap anak	Adanya <i>political will</i> dan <i>affirmative action</i> terhadap perempuan Penegakan regulasi terkait perlindungan anak Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar stakeholders (termasuk LSM perempuan dan perlindungan anak)	1. Persentase perempuan yang bekerja dalam: -Lembaga Politik -Lembaga Pemerintah -Lembaga swasta 2. Jumlah KDRT 3. Jumlah pekerja anak dibawah umur 4. Jumlah kekerasan terhadap anak		30%	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan gender dalam pembangunan Program Peningkatan kualitas Perempuan dan anak Perlindungan hak perempuan dan anak Program Pembinaan Anak Terlantar	Pemberdayaan Perempuan	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB	-Bappeda -Dinas Pendidikan -Dinas sosial -Seluruh Kecamatan/ Desa/Kelurahan -DPRD

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Target		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung	
					Tahun Awal 2012	Tahun Akhir 2018					
4.	Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Meningkatkan kualitas SDM tenaga instruktur pelatihan Menyediakan sarana dan prasarana pelatihan yang memadai	Kemitraan pelatihan tenaga kerja antara penyelenggara dan pengguna tenaga kerja Pengembangan kelembagaan pelatihan	Jumlah lulusan pelatihan Kapasitas pelatihan			Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Bappeda
4.	Meningkatkan keimanan dan ketakwaan	Terjaminnya keadaan yang kondusif bagi penghayatan dan pengamalan agama Terpeliharanya kerukunan intra dan antar umat beragama	Kerjasama pemerintah dan tokoh agama dalam pemeliharaan situasi kondusif bagi kehidupan beragama	Fasilitasi sarana / prasarana ibadah Pembinaan dan peningkatan insentif pemuka agama	Rasio tempat ibadah			Program pemberdayaan Kesramas	Kesra	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bappeda
			Pemeliharaan kerukunan beragama	Jumlah dai/mubalig/guru mengaji dan pemuka agama yang mendapatkan bantuan dan pembinaan				Program pembinaan dan pelayanan umat beragama	Kesra	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bappeda, Seluruh kecamatan/ Desa/Kelurahan

MISI 3 ; Percepatan pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Target		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
					Tahun Awal 2012	Tahun Akhir 2018				
1. Menurunkan tingkat kemiskinan	Menurunnya jumlah penduduk miskin	Melakukan percepatan pengentasan kemiskinan dengan cara memfokuskan pada daerah-daerah (kecamatan) yang memiliki tingkat kemiskinan paling tinggi	Pengurangan kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, melalui:	Jumlah penduduk miskin	79.127	Menurun	Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan	Sosial	Dinas Sosial, BPMPD	Bappeda, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Kelautan & Perikanan, Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM, Seluruh kecamatan
	Menurunnya persentase penduduk miskin menjadi 12% - 11%	Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin	Penajaman prioritas program dan sasaran untuk kelompok masyarakat sangat miskin.	Persentase penduduk miskin	18,7%	12-11%	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, Program	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan & Perikanan, Dinas Pertanian dan Peternakan,	Bappeda, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Sosial, Dinas Perindag, Dinas

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Target		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
					Tahun Awal 2012	Tahun Akhir 2018				
							<p>Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan</p> <p>Program peningkatan kesejahteraan petani;</p> <p>Program pengembangan wilayah transmigrasi;</p>			Koperasi dan UKM, Dinas Nakertrans, Seluruh kecamatan
	Menurunnya indeks kedalaman kemiskinan	Pemberdayaan ekonomi rakyat dengan kepastian modal dan kepastian pasar	Peningkatan bantuan perlindungan sosial bagi kelompok miskin.	Indeks Kedalaman Kemiskinan	-	Menurun	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh; Program pelayanan kesehatan penduduk miskin, Program Pemberdayaan Masyarakat/ PetaniNelayan	Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kelautan Perikanan, Dinas Kesehatan	Dinas Nakertrans, Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM, Seluruh kecamatan
	Menurunnya indeks keparahan kemiskinan	Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat miskin agar dapat berperan aktif dalam	Peningkatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat miskin dan lembaga	Indeks Keparahannya Kemiskinan	-	Menurun	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM;	Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi dan UKM	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerihan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Target		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
					Tahun Awal 2012	Tahun Akhir 2018				
		pembangunan	desa/kelurahan dalam melaksanakan pembangunan.				Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa			n Desa, Seluruh kecamatan
2 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan ekonomi mencapai 8% - 9% Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	Mengembangkan ekonomi kerakyatan Menyediakan dan memperbaiki serta menata dengan baik daerah tujuan wisata (DTW) Pembangunan fasilitas dan infrastruktur di DTW	Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat Pembangunan akses menuju sentra ekonomi Peningkatan anggaran pariwisata	Pertumbuhan ekonomi Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	7,77	8-9%	Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Program peningkatan kesempatan kerja Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan Program peningkatan kesejahteraan petani Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah serta usaha perdagangan Program Pengembangan	Ekonomi	Bappeda	Dispora Budpar, Dinas Perindag, Dinas Nakertrans, Dinas Pertanian dan Peternakan -Dinas Kehutanan dan Perkebunan -Dinas Kelautan dan Perikanan, Seluruh kecamatan/desa/kelurahan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Target		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
					Tahun Awal 2012	Tahun Akhir 2018				
							Nilai Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Promosi Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata			
	Meningkatnya PDRB ADH Konstan 8% - 9% Meningkatnya jumlah Investasi	Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat Menciptakan iklim investasi yang kondusif	Percepatan pembangunan ekonomi di Kabupaten Parigi Moutong	PDRB ADH Konstan Jumlah Investasi	-	-	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	BPMPD, Dinas Pertanian dan Peternakan Dinas Perindag	Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas Perindag, Kantor Pelayanan Ijin Terpadu

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Target		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
					Tahun Awal 2012	Tahun Akhir 2018				
	Meningkatnya PDRB per kapita 19 juta – 20 juta	Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	Peningkatan ekonomi Masyarakat Kabupaten Parigi Moutong Regulasi yang mendukung investasi	PDRB per kapita	19,25	22 juta	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program peningkatan kesejahteraan pertanian, pelatihan dan pelaku agribisnis	Tenaga Kerja	Bappeda Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh	Asisten Perekonomian dan Pembangunan, BPS, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kelautan & Perikanan
	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka (TPT) menjadi 2%-3%	Membuka kesempatan kerja seluas-luasnya dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan	Penyediaan dan perluasan lapangan kerja produktif	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	3,43%	2-3%	Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program peningkatan pengembangan industri kecil dan menengah	Tenaga Kerja	Dinas Nakertrans	Disperindag, Bappeda, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kelautan & Perikanan
	Meningkatnya jumlah koperasi aktif, UMKM dan industri kecil menengah	Melaksanakan pelatihan dan pendampingan bagi IKM dan UKM dan koperasi Menciptakan	Penguatan kapasitas manajerial dan teknologi industri berbasis komoditas unggulan	1. Persentase koperasi aktif 2. Jumlah BPR/LKM 3. Persentase UMKM	89% 2	95% 8	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Peningkatan	Perindustrian Koperasi dan UKM	Dinas Perindustrian & Perdagangan Dinas	-KPPT - Seluruh Kecamatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Target		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
					Tahun Awal 2012	Tahun Akhir 2018				
	yang ada di Kabupaten Parigi Moutong	akses pasar dan akses informasi bagi IKM dan UKM	<p>Bantuan peralatan dan permodalan bagi IKM dan UKM</p> <p>Penguatan dan pembinaan kapasitas manajer dan pengurus koperasi</p> <p>Pembinaan <i>link and match</i> antara koperasi dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya</p>	<p>yang dibantu oleh BUMN dan BUMS</p> <p>4. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB ADHK</p> <p>5. Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri</p> <p>6. Pertumbuhan industry</p> <p>7. Cakupan jumlah kelompok pengrajin</p>	15%	35%	<p>Teknologi Industri</p> <p>Program Penataan Struktur Industri</p> <p>Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif</p> <p>Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Komperatif usaha kecil</p> <p>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil</p>		Koperasi & UKM	
					6,04%	7.84%				
					2,22%	6.80%				
					2,34%	7-8%				
					2,48%	7-8%				

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Target		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
					Tahun Awal 2012	Tahun Akhir 2018				
							Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			

MISI 4: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dasar Dengan Memperhatikan Aspek Pemerataan Pembangunan Dan Mengutamakan Faktor Pengungkit Perekonomian Rakyat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Target		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab		
					Tahun Awal 2012	Tahun Akhir 2018					
1	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar	1 . Meningkatnya proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik menjadi 34%-35%	1 . Meningkatkan pembangunan jalan baik jalan yang sudah rusak maupun jalan baru yang prioritas	1 . Peningkatan pembangunan jalan khususnya jalan akses menuju lokasi pusat ekonomi produktif dan jalan pada kantong-kantong kemiskinan	1 . Panjang jalan dalam kondisi baik	22%	34-35%	Program pembangunan jalan dan jembatan	Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum	Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Bappeda, Dinas Pendapatan, Badan Pengembangan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Target		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	
					Tahun Awal 2012	Tahun Akhir 2018				
										Kesehatan, seluruh kecamatan
	2 . Meningkatnya panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik menjadi 61%-62%	2 . Meningkatkan pembangunan jalan Kabupaten khususnya akses menuju kantong produksi (jalan usaha tani)	2 . Peningkatan pembangunan jalan khususnya jalan akses menuju lokasi pusat ekonomi produktif dan jalan pada kantong-kantong kemiskinan	2 . Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik	54,98%	61%-62%	Program rehabilitasi jalan dan jembatan	Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum	Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Bappeda, Dinas Pendapatan, Badan Pengembangan Keuangan dan Aset Daerah, seluruh kecamatan
	3 . Meningkatnya jumlah jembatan	3 . Meningkatkan pembangunan jembatan baik jembatan yang sudah rusak maupun jembatan baru yang prioritas	3 . Prioritas anggaran untuk pembangunan jembatan	3 . Jumlah jembatan dalam kondisi baik meningkat setiap tahunnya	-	Meningkat	Program pengadaan sarana dan prasarana transportasi pedesaan Program pembangunan jalan dan jembatan Program Rehabilitasi/Peeliharaan jalan dan	Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum	Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Bappeda, Dinas Pendapatan, Badan Pengembangan Keuangan dan Aset Daerah, seluruh kecamatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Target		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	
					Tahun Awal 2012	Tahun Akhir 2018				
							jembatan			
	4 . Meningkatnya jumlah gedung/bangunan milik publik	4 . Meningkatkan pembangunan gedung/ bangunan milik publik	4 . Peningkatan kualitas sarana dan prasarana public	4 . Jumlah gedung/ bangunan milik publik meningkat setiap tahunnya	-	Meningkat	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Kebinamargaan	Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum	Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Bappeda, Dinas Pendapatan, Badan Pengembangan Keuangan dan Aset Daerah, seluruh kecamatan

MISI 5 : Memantapkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat guna memacu akselerasi pembangunan daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Target		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab		
					Tahun Awal 2012	Tahun Akhir 2018					
1. Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	1	Menurunnya konflik komunal dan konflik SARA	Menjaga dan meningkatkan kerukunan antara warga serta meningkatkan harmonisasi hubungan antar pihak Menumbuhkan wawasan kesatuan bangsa Menurunkan terjadinya konflik komunal, SARA dan konflik antar wilayah	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar umat beragama (FKUB)	1. Rasio Jumlah Pol-PP per 10.000 Penduduk 2. Rasio Jumlah Pos Siskamling Per 10.000 Penduduk		Menurun	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program peningkatan penanggulangan narkoba	Satpol PP	Satpol PP, seluruh kecamatan	Badan Kesbangpol Linmas, Bappeda (Bagian Sosbud), Dinas Pendidikan, Dispora Budpar, Dinas Kesehatan,
	2	Meningkatnya kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan organisasi kepemudaan	Meningkatkan kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan (organisasi kepemudaan	Optimalisasi pembinaan LSM, Ormas dan OKP	1. Jumlah LSM 2. Jumlah klub Olahraga/Seni 3. Jumlah gedung Olahraga/Seni 4. Jumlah Organisasi Pemuda 5. Jumlah Organisasi Olahraga/Seni 6. Jumlah Kegiatan Olahraga/Seni		Meningkat	Program peningkatan peran serta kepemudaan Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kesbangpol	Badan Kesbangpol Linmas Dinas OlahRaga, Kebudayaan dan Pariwisata (Dispora Budpar)	Dinas Pendidikan, Satpol PP, Bappeda (Bagian Sosbud, seluruh kecamatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Target		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab		
					Tahun Awal 2012	Tahun Akhir 2018					
	3	Menurunnya tingkat kriminalitas	Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum dengan melibatkan semua <i>stakeholders</i>	Peningkatan keamanan dan ketertiban umum melalui optimalisasi peran polisi pamong praja, satuan Linmas dan koordinasi aparat kepolisian serta dukungan masyarakat Penegakan supremasi hukum	Menurunnya angka Kriminalitas Menurunnya angka demo			Program wawasan kebangsaan; Program pendidikan politik masyarakat Program peningkatan peran serta kepemudaaan Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Kesbangpol	Badan Kesbangpol Linmas	Badan Narkotika Kabupaten, Satpol PP, Dinas Pemuda OR, Kebudayaan & Dispora Budpar, Bappeda (Bagian Sosbud)
	5	Menurunnya kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat Pemda	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat (khususnya aparat Pemda) agar dapat menaati peraturan-peraturan yang berlaku		Jumlah pelanggaran Perda dan Peraturan Bupati yang ditertibkan			Program: Penataan Peraturan Perundang-undangan	Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat,	Seluruh kecamatan/desa/kelurahan

MISI 6: Melaksanakan Pengelolaan, Penataan Dan Pelestarian Sumberdaya Alam Secara Berkelanjutan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Target		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
					Tahun Awal 2012	Tahun Akhir 2018				
1. Memperbaiki pengelolaan dan penataan, serta pelestarian sumberdaya alam	- Menurunnya tingkat kerusakan hutan (<i>deforestation</i>) dan <i>illegal logging</i>	Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hutan bagi kelangsungan hidup manusia Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hutan bagi kelangsungan hidup manusia	Penegakan peraturan-peraturan yang mendukung terciptanya pengelolaan hutan lestari Penegakan peraturan-peraturan yang mendukung terciptanya pengelolaan hutan lestari	1. Persentase kerusakan hutan 2. Persentase rehabilitas hutan dan lahan kritis yang dilakukan		Menurun Meningkat	Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan Program perencanaan dan pengembangan hutan	Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup,	Dinas Pendidikan, Asisten Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat, Seluruh Kecamatan
	- Menurunnya <i>illegal fishing</i>	Meningkatkan kualitas SDM nelayan Menyiapkan sarana dan parasarana bagi nelayan dalam menangkap ikan	Pemberdayaan ekonomi masyarakat di kawasan pesisir Peningkatan pengelolaan, pengawasan dan perlindungan terhadap kawasan konservasi	Persentase <i>illegal fishing</i>		Menurun	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, Asisten Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat, Seluruh Kecamatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Target		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
					Tahun Awal 2012	Tahun Akhir 2018				
			sumberdaya laut				kelautan			
	- Menurunnya <i>illegal Mining</i>	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sistem pertambangan yang baik dan benar dengan tidak mengabaikan aspek lingkungan	Penegakan peraturan-peraturan yang mendukung terciptanya sistem pertambangan yang baik dan benar melalui sosialisasi Perda tentang pertambangan mineral	Persentase <i>illegal mining</i>		Menurun	Program perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	Urusan Pilihan	Dinas ESDM	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, Asisten Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat, Seluruh Kecamatan Satpol PP,
	- Meningkatnya kawasan tertutup pepohonan	Meningkatkan rasio luasan kawasan tertutup pepohonan melalui pengelolaan lahan kritis dan konservasi lahan berupa usaha pencegahan kerusakan	Peningkatan luas kawasan tertutup pepohonan	Rasio kawasan tertutup pepohonan			Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Lingkungan Hidup	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Asisten Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat, Seluruh Kecamatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Target		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
					Tahun Awal 2012	Tahun Akhir 2018				
		baru, memperbaiki kerusakan, pemeliharaan dan mempertahankan serta meningkatkan kesuburan lahan								
	- Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Mempertahankan fungsi RTH dan taman kota sebagai komitmen <i>stakeholders</i> untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dengan melibatkan masyarakat	Peningkatan luas RTH dan pemeliharaan taman kota dengan melibatkan partisipasi dunia usaha dan masyarakat agar dapat Parigi dapat meraih Kota Adipura	Luas ruang terbuka hijau			Program rehabilitasi hutan dan lahan, Program pemanfaatan potensi sumberdaya hutan	Lingkungan Hidup	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dinas Kehutanan dan perkebunan, Dinas Pendidikan, Seluruh kecamatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Target		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
					Tahun Awal 2012	Tahun Akhir 2018				
	- Meningkatnya ruang terbuka hijau	Mempertahankan fungsi RTH dan taman kota sebagai komitmen <i>stakeholders</i> untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dengan melibatkan masyarakat	Peningkatan luas RTH dan pemeliharaan taman kota dengan melibatkan partisipasi dunia usaha dan masyarakat agar dapat Parigi dapat meraih Kota Adipura	Ruang Terbuka Hijau			Program Pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup	Lingkungan Hidup	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Satpol PP, Badan Kesbangpol Linmas, Bappeda, Seluruh Kecamatan
	- Menurunnya kawasan kumuh di daerah pesisir dan pedalaman	Mengoptimalkan peran stakeholder dalam pembangunan rumah seperti memanfaatkan potensi lembaga pembiayaan keuangan lokal	Perbaikan rumah dan lingkungan	Tempat pembuangan sampah Rumah layak huni	11,78%	17%-18%	Program Lingkungan sehat perumahan pengelolaan sampah; Program Pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup	Pekerjaan Umum	Dinas PU	BPMPD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Seluruh Kecamatan
	- Meningkatnya akses air bersih layak	Mengurangi proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air bersih melalui peningkatan sarana	Peningkatan akses masyarakat terhadap air bersih	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih layak	34%	50%	Program Lingkungan sehat perumahan pengelolaan sampah; Program Pengendalian pencemaran dan pengrusakan	Lingkungan Hidup	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dinas PU,

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Target		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
					Tahun Awal 2012	Tahun Akhir 2018				
		prasarana dan layanan jaringan perpipaan air bersih PDAM di perkotaan; mengembangkan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pansimas), Inventarisasi, pemulihan dan perlindungan terhadap sumber sumber air baik di pedesaan maupun perkotaan melalui kerja sama dengan masyarakat dan dengan pemerintah tingkat RT dan RW					lingkungan hidup			Dinas Kesehatan, Seluruh kecamatan
	- Meningkatnya sanitasi layak	Mengurangi proporsi rumah tangga yang tidak memiliki akses sanitasi dasar melalui peningkatan ketersediaan prasarana	Pembangunan sanitasi layak bagi masyarakat	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi layak	48,34%	53%-54%	Program Pengembangan lingkungan sehat; Program pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup; Program	Lingkungan Hidup	Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dinas PU, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Badan Pemberdayaan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Target		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
					Tahun Awal 2012	Tahun Akhir 2018				
		sarana sanitasi dasar yang memadai melalui partisipasi masyarakat; dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah, persampahan dan drainase melalui pembinaan SDM					pengembangan kinerja pengelolaan persampahan			Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2. Mewujudkan pemanfaatan ruang yang lestari dan bijaksana	<p>1 Meningkatkan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya</p> <p>2 Meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang untuk pendirian bangunan (permukiman)</p>	<p>Meningkatkan kesesuaian tata ruang wilayah, tata ruang kota dan pemanfaatan tata ruang secara terkontrol dan terkendali</p> <p>Mempertahankan khasanah arsitektur lokal</p> <p>Menjaga dan memperhatikan aspek lingkungan sesuai dengan perkembangan</p>	<p>1 Mengimplementasikan secara konsisten Perda Rencana Tata Ruang Wilayah</p> <p>Penguatan regulasi yang bertujuan untuk mempertahankan khasanah arsitektur lokal dan mempertahankan aspek lingkungan</p>	<p>1 Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya</p> <p>Rasio bangunan ber IMB persatuan bangunan</p> <p>Ketaatan terhadap RTRW</p> <p>Luas wilayah produktif</p>			<p>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</p> <p>Program Perencanaan Tata Ruang</p> <p>Program Pengembangan Geologi Daerah</p>	Penataan Ruang	Dinas PU	-Bappeda -Dinas ESDM -Semua SKPD

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Target		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
					Tahun Awal 2012	Tahun Akhir 2018				
		pembangunan wilayah Kabupaten Parigi Moutong		Luas wilayah industri Luas wilayah kebanjiran Luas wilayah kekeringan						
3. Mewujudkan masyarakat yang tangguh terhadap bencana	Meningkatnya kewaspadaan dan mitigasi terhadap bencana	Meningkatkan kemampuan dan daya tanggap masyarakat terhadap bencana Meningkatkan koordinasi pengendalian pemantauan penanganan tanggap darurat bencana	Peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan bencana Penyediaan dan pengembangan infrastruktur dan logistik penanganan bencana Pengembangan sistem informasi penanggulangan bencana	Persentase Desa yang telah mengikuti kegiatan Kelompok Masyarakat Peduli Bencana (KMPB) Presentase aparaturnya yang bersertifikat Pelatihan Tanggap Bencana			Program Perbaikan Perumahan akibat bencana alam/ sosial Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan korban bencana alam Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam, Laut & Perkiraan Iklim Laut Program Perbaikan Perumahan akibat bencana alam/ social Program	Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Alam	-Kesbangpol -Dinas Kelautan dan Perikanan -Dinas PU

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Target		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pendukung
					Tahun Awal 2012	Tahun Akhir 2018				
							Pengendalian Banjir			